

ABSTRACT

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengkaji atau melihat adanya disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terutama tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari klien atau wajib pajak berdasarkan Undang-Undang dengan tugas dari instansi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dapat menyimpangi Undang-Undang atas perintah Undang-Undang.

Mengingat fungsi dan tanggungjawab Notaris maka dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Notaris dihadapkan pada suatu dilema bahwa peraturan perUndang-Undangan yang manakah yang harus dilaksanakan,

Kata Kunci : Kenotariatan, Fungsi notaris, Tanggungjawab Notaris

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine or see the existence of disharmony between the Act of Notary Position and the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. All about Notaries to protect the confidentiality of data obtained from clients or taxpayers based on the Act with the task of the center of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) which can deviate the Law at the request of the law.

Suspension of Notary Money is faced with several legislative dilemmas on the Determination and Ratification of the Notary Position Law with the Law on Prevention and Eradication

Keywords: Notary, Notary Function, Notary Responsibility